

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BUMNAGORI MELALUI APLIKASI PPAK BUMDES DI KANTOR CAMAT TANAH JAWA

Wico J Tarigan^{1)*}, Sri Martina²⁾, Djuli Sjafei Purba³⁾, Liharman Saragih⁴⁾, Mahaitin H Sinaga⁵⁾, Tuahman Sipayung⁶⁾, Elfina O P Damanik⁷⁾, Raja Mangaratua Nainggolan⁸⁾, Dian G Purba Tambak⁹⁾, Christin Imelda Girsang¹⁰⁾, Christian Daniel Hermes¹¹⁾, Johanes Wilfrid Pangihutan Purba¹²⁾, Immanuelta Sitepu¹³⁾, Nabila Nurfadila¹⁴⁾, Mael Vantri Gultom¹⁵⁾, Romika Ambarita¹⁶⁾, Santri A Sijabat¹⁷⁾, Yuni Lestari Br Sitepu¹⁸⁾

^{1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),11),12)}Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

^{13),14),15),16),17)}Mahasiswa Fakultas Ekonomi

¹⁸⁾Universitas Sumatera Utara

*Correspondence email: wico.trg@gmail.com

Abstract

The preparation of accountable financial reports is an important aspect in strengthening the governance of BUMNagori as a village-owned enterprise at the nagori level. However, several BUMNagori treasurers still face difficulties in understanding basic accounting principles, analyzing transactions, converting cash book records into general journals, using digital-based accounting applications, and organizing transaction evidence systematically. This community service activity aimed to improve the capacity of BUMNagori treasurers and managers in preparing financial reports through the PPAK BUMDes application. The activity was conducted through face-to-face mentoring at the Tanah Jawa Sub-District Office, Simalungun Regency. The participants consisted of 51 BUMNagori treasurers and managers from Tanah Jawa, Huta Bayu Raja, Jawa Maraja Bah Jambi, and Hatonduhan Sub-Districts. The mentoring stages included material presentation, review of basic accounting equations, transaction analysis, general journal simulation, practice of recording transactions from the cash book into the PPAK BUMDes application, discussion, and evaluation. The results showed that participants improved their understanding of basic accounting, transaction analysis, general journal preparation, application-based recording, and the importance of transaction document archiving. This activity contributed to strengthening transparency, accountability, effectiveness, and financial governance of BUMNagori. Continuous mentoring and periodic monitoring are recommended to ensure sustainable application-based financial reporting practices.

Keywords: BUMNagori, financial reports, PPAK BUMDes, Mentoring

Abstrak

Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel merupakan aspek penting dalam memperkuat tata kelola BUMNagori sebagai lembaga usaha milik nagori. Namun, sebagian bendahara dan pengelola BUMNagori masih menghadapi kendala dalam memahami prinsip dasar akuntansi, menganalisis transaksi, mengubah pencatatan Buku Kas Umum menjadi jurnal umum, menggunakan aplikasi akuntansi berbasis digital, serta menata bukti transaksi secara sistematis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas bendahara dan pengelola BUMNagori dalam menyusun laporan keuangan melalui aplikasi PPAK BUMDes. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan tatap muka di Kantor Camat Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Peserta kegiatan berjumlah 51 orang yang berasal dari Kecamatan Tanah Jawa, Huta Bayu Raja, Jawa Maraja Bah Jambi, dan Hatonduhan. Tahapan kegiatan meliputi penyampaian materi, review persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, simulasi jurnal umum, praktik pencatatan dari Buku Kas Umum ke aplikasi PPAK BUMDes, diskusi, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai akuntansi dasar, analisis transaksi, penyusunan jurnal umum, penggunaan aplikasi PPAK BUMDes, dan pentingnya pengarsipan bukti transaksi. Kegiatan ini

Wico J Tarigan, Sri Martina, Djuli Sjafei Purba, Liharmen Saragih, Mahaitin H Sinaga, Tuahman Sipayung, Elfina O P Damanik, Raja Mangaratua Nainggolan, Dian G Purna, Christin Imelda Girsang, Christian Daniel Hermes, Johanes Wilfrid Pangihutan Purba, Immanuelta Sitepu, Nabila Nurfadila, Mael Vantri Gultom, Romika Ambarita, Santri A Sijabat

berkontribusi terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tata kelola keuangan BUMNagori.

Kata Kunci: BUMNagori, Laporan Keuangan, PPAK BUMDes, Pendampingan

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa merupakan instrumen kelembagaan ekonomi desa yang berperan dalam mengelola usaha, memanfaatkan potensi dan aset desa, mengembangkan kegiatan ekonomi lokal, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Simalungun, kelembagaan ini dikenal dengan istilah BUMNagori sesuai dengan nomenklatur pemerintahan nagori. Sebagai lembaga usaha milik nagori, BUMNagori tidak hanya dituntut mampu mengelola unit usaha, tetapi juga harus mampu menyelenggarakan administrasi, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan secara tertib. Pengelolaan keuangan yang tertib menjadi bagian penting dari akuntabilitas sektor publik karena laporan keuangan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi (Mardiasmo, 2021; Mahmudi, 2026).

Penguatan tata kelola BUMNagori memiliki dasar yang kuat dalam kebijakan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga tata kelola desa perlu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek Badan Usaha Milik Desa, mulai dari pendirian, organisasi, rencana program kerja, modal, aset, pengadaan barang/jasa, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, hingga pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Dengan demikian, pelaporan keuangan BUMNagori perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban tata kelola, bukan sekadar

kegiatan administratif.

Akuntabilitas keuangan menjadi salah satu unsur utama dalam pengelolaan BUMNagori. Laporan keuangan yang baik dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada pemerintah nagori, pengawas, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat pengendalian, evaluasi perkembangan usaha, dasar pengambilan keputusan, serta acuan dalam pembagian laba usaha atau penanganan kerugian. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, laporan keuangan tidak hanya menunjukkan posisi keuangan, tetapi juga mencerminkan kualitas pengelolaan sumber daya publik, kepatuhan terhadap aturan, dan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan mandatnya (Nordian & Hertianti, 2018; Halim & Kusufi, 2018).

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan laporan keuangan BUMNagori adalah masih terbatasnya pemahaman bendahara dan pengelola terhadap prinsip dasar akuntansi. Sebagian pengelola masih memahami pencatatan keuangan hanya sebagai pencatatan kas masuk dan kas keluar dalam Buku Kas Umum. Padahal, laporan keuangan membutuhkan proses pencatatan yang lebih sistematis, mulai dari identifikasi bukti transaksi, analisis transaksi, pengelompokan akun, penyusunan jurnal umum, hingga penyajian laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Sujarweni & Jaya, 2019) menjelaskan bahwa tata kelola keuangan desa membutuhkan ketertiban administrasi, pencatatan yang konsisten, serta kemampuan aparatur dalam memahami alur transaksi dan pertanggungjawaban keuangan.

Selain keterbatasan pemahaman akuntansi, penggunaan aplikasi keuangan juga menjadi tantangan tersendiri. Aplikasi

PPAK BUMDes diharapkan dapat membantu proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan BUMNagori secara lebih terstruktur. Namun, pemanfaatan aplikasi tidak akan berjalan optimal apabila peserta belum memahami dasar akuntansi, alur pencatatan transaksi, dan hubungan antara Buku Kas Umum, jurnal umum, bukti transaksi, serta laporan keuangan. Oleh karena itu, pendampingan teknis diperlukan agar aplikasi tidak hanya dipahami sebagai perangkat digital, tetapi juga sebagai instrumen penguatan akuntabilitas keuangan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem informasi akuntansi akan efektif apabila didukung oleh kompetensi pengguna, prosedur kerja yang jelas, dan dokumentasi transaksi yang memadai (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019; Mardiasmo, 2018).

Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMNagori melalui aplikasi PPAK BUMDes di Kantor Camat Tanah Jawa dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas bendahara dan pengelola BUMNagori. Kegiatan ini difokuskan pada peserta dari Kecamatan Tanah Jawa, Huta Bayu Raja, Jawa Maraja Bah Jambi, dan Hatonduhan. Pemilihan lokus di Kantor Camat Tanah Jawa memberikan ruang pelaksanaan yang lebih terarah karena peserta dapat mengikuti pembelajaran tatap muka, praktik langsung, diskusi, dan pendampingan atas kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bendahara serta pengelola BUMNagori dalam menyusun laporan keuangan melalui aplikasi PPAK BUMDes. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan membantu peserta memahami persamaan dasar akuntansi, menganalisis transaksi, menyusun jurnal umum dari Buku Kas Umum, menggunakan aplikasi PPAK BUMDes, menata bukti transaksi, serta memperkuat akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan tata kelola keuangan BUMNagori.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMNagori melalui aplikasi PPAK BUMDes. Lokasi kegiatan adalah Kantor Camat Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 6 November 2025. Peserta kegiatan berjumlah 51 orang bendahara dan pengelola BUMNagori yang berasal dari Kecamatan Tanah Jawa sebanyak 19 orang, Huta Bayu Raja sebanyak 15 orang, Jawa Maraja Bah Jambi sebanyak 8 orang, dan Hatonduhan sebanyak 9 orang.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan praktik langsung. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi mengenai laporan keuangan BUMNagori, kebijakan akuntansi, persamaan dasar akuntansi, pengenalan akun akuntansi, teknik analisis transaksi, serta penggunaan aplikasi PPAK BUMDes. Pendekatan ini dipilih karena peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi, tetapi juga memerlukan proses pembelajaran yang membantu peserta memahami konsep, prosedur, dan praktik pencatatan keuangan (Sujarweni & Jaya, 2019; Halim & Kusufi, 2018).

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi registrasi peserta, pembukaan, penyampaian materi, review persamaan akuntansi dan teknik analisis transaksi, simulasi jurnal umum ke aplikasi PPAK BUMDes, praktik jurnal umum dari Buku Kas Umum ke aplikasi PPAK BUMDes, pembahasan SOP pengadaan barang/jasa BUMNagori, teknik pengarsipan bukti-bukti belanja, landasan hukum musyawarah nagori laporan tahunan BUMNagori, kebijakan pembagian laba usaha atau kerugian usaha, diskusi, serta evaluasi.

Media dan instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi materi presentasi, contoh transaksi, format Buku Kas Umum, format jurnal umum, aplikasi PPAK BUMDes, lembar observasi, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, serta umpan

Wico J Tarigan, Sri Martina, Djuli Sjafei Purba, Liharman Saragih, Mahaitin H Sinaga, Tuahman Sipayung, Elfina O P Damanik, Raja Mangaratua Nainggolan, Dian G Purna, Christin Imelda Girsang, Christian Daniel Hermes, Johanes Wilfrid Pangihutan Purba, Immanuelta Sitepu, Nabila Nurfadila, Mael Vantri Gultom, Romika Ambarita, Santri A Sijabat

balik peserta. Evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan melihat kemampuan peserta dalam memahami materi, mengikuti simulasi, menyusun jurnal umum, melakukan input transaksi, dan menjelaskan pentingnya bukti transaksi dalam pertanggungjawaban keuangan BUMNagori.

Skema pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMNagori melalui aplikasi PPAK BUMDes di Kantor Camat Tanah Jawa dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami, mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan secara lebih tertib. Kegiatan ini diikuti oleh 51 orang bendahara dan pengelola BUMNagori dari Kecamatan Tanah Jawa, Huta Bayu Raja, Jawa Maraja Bah Jambi, dan Hatonduhan.



Gambar 2: Foto bersama Narasumber, Tim DPMN Kabupaten Simalungun dan Camat Tanah Jawa

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penguatan pemahaman akuntansi dasar dan praktik pencatatan berbasis aplikasi. Materi yang diberikan meliputi laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, persamaan dasar akuntansi, pengenalan akun akuntansi, teknik analisis transaksi, pengenalan aplikasi PPAK BUMDes, simulasi jurnal umum ke aplikasi, praktik penyusunan jurnal umum dari Buku Kas Umum, SOP pengadaan barang/jasa BUMNagori, teknik pengarsipan bukti transaksi, landasan hukum musyawarah nagori laporan tahunan BUMNagori, serta kebijakan pembagian laba usaha atau kerugian usaha BUMNagori. Materi tersebut relevan dengan kebutuhan tata kelola keuangan BUMNagori karena pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan kemampuan mencatat, mengklasifikasi, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan transaksi secara tertib (Nordian & Hertianti, 2018; Mardiasmo, 2021).



Gambar 3: Peserta sedang Pelatihan

Pendampingan tatap muka memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Peserta dapat menyampaikan kendala yang dialami dalam pencatatan transaksi, memahami contoh transaksi yang diberikan, serta mempraktikkan proses penyusunan jurnal umum dan input transaksi ke aplikasi. Pendekatan ini penting karena peserta memiliki latar belakang kemampuan akuntansi dan penguasaan teknologi yang beragam. Dalam pengelolaan keuangan desa, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting karena ketepatan laporan sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola dalam memahami aturan, prosedur, dan bukti transaksi (Sujarweni & Jaya, 2019)

Capaian kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada penguatan keterampilan praktis. Peserta diarahkan untuk memahami hubungan antara bukti transaksi, Buku Kas Umum, jurnal umum, aplikasi PPAK BUMDes, dan laporan keuangan BUMNagori.

Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi bahwa pencatatan transaksi harus didasarkan pada bukti yang sah, diklasifikasikan dalam akun yang tepat, dan disajikan dalam laporan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019 ; Halim & Kusufi, 2018).

Capaian Kegiatan Pendampingan

Tabel 1. Capaian Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMNagori

No	Aspek Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Capaian Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	Pemahaman laporan keuangan BUMNagori	Penyampaian materi dan diskusi	Peserta memahami fungsi laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan evaluasi usaha	Peserta mampu menjelaskan tujuan laporan keuangan BUMNagori
2	Penguatan akuntansi dasar	Review persamaan dasar akuntansi dan pengenalan akun	Peserta memahami konsep aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban	Peserta mampu mengelompokkan transaksi ke dalam akun yang sesuai
3	Analisis transaksi	Studi kasus dan diskusi transaksi BUMNagori	Peserta mulai mampu menganalisis pengaruh transaksi terhadap akun	Peserta mampu membedakan posisi debit dan kredit pada transaksi sederhana
4	Penyusunan jurnal umum dari BKU	Praktik konversi transaksi BKU menjadi jurnal umum	Peserta memahami tahapan mengubah pencatatan kas menjadi jurnal akuntansi	Peserta mampu menyusun contoh jurnal umum berdasarkan transaksi latihan
5	Penggunaan aplikasi PPAK BUMDes	Simulasi input transaksi ke aplikasi	Peserta mengenal alur penggunaan aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan	Peserta mampu melakukan input transaksi sederhana pada aplikasi
6	Pengarsipan bukti transaksi	Penjelasan dan diskusi teknik pengarsipan dokumen	Peserta memahami pentingnya bukti transaksi sebagai dasar pertanggungjawaban	Peserta mampu mengelompokkan bukti transaksi berdasarkan jenis dan waktu transaksi
7	Penguatan tata kelola keuangan	Diskusi akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan pelaporan	Peserta memahami hubungan antara laporan keuangan dan tata kelola BUMNagori	Peserta menyadari pentingnya laporan berkala, tertib dokumen, dan penggunaan aplikasi

Berdasarkan Tabel 1, capaian kegiatan memperlihatkan bahwa peserta

Wico J Tarigan, Sri Martina, Djuli Sjafei Purba, Liharmen Saragih, Mahaitin H Sinaga, Tuahman Sipayung, Elfina O P Damanik, Raja Mangaratua Nainggolan, Dian G Purna, Christin Imelda Girsang, Christian Daniel Hermes, Johanes Wilfrid Pangihutan Purba, Immanuelta Sitepu, Nabila Nurfadila, Mael Vantri Gultom, Romika Ambarita, Santri A Sijabat

memperoleh pemahaman yang lebih terarah mengenai penyusunan laporan keuangan BUMNagori. Capaian utama terlihat pada kemampuan peserta memahami fungsi laporan keuangan, mengenali akun-akun dasar, menganalisis transaksi sederhana, menyusun jurnal umum, serta memahami fungsi aplikasi PPAK BUMDes dalam proses pencatatan. Capaian ini mendukung konsep akuntabilitas sektor publik, yaitu bahwa setiap penggunaan sumber daya harus dapat dijelaskan, dicatat, dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat (Mardiasmo, 2021; Mahmudi, 2016).

Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Sebelum pendampingan, sebagian peserta masih memahami laporan keuangan sebagai pencatatan kas masuk dan kas keluar. Setelah pendampingan, peserta mulai memahami bahwa laporan keuangan membutuhkan proses pencatatan yang lebih sistematis dan harus didukung oleh bukti transaksi yang tertata. Perubahan ini penting karena pengelolaan keuangan yang akuntabel menuntut adanya keterkaitan antara transaksi, bukti, pencatatan, laporan, dan pertanggungjawaban (Soleh & Rohmansjah, 2015; (Sujarweni & Jaya, 2019).

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No	Aspek	Kondisi Sebelum Bimtek	Kondisi Sesudah Bimtek	Keterangan
1	Pemahaman laporan keuangan	Laporan keuangan masih dipahami sebagai pencatatan kas sederhana	Peserta memahami laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BUMNagori	Perlu pendampingan lanjutan agar diterapkan secara konsisten
2	Pemahaman akuntansi dasar	Sebagian peserta belum memahami persamaan dasar akuntansi dan klasifikasi akun	Peserta mulai memahami aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban	Perlu latihan lanjutan menggunakan contoh transaksi riil
3	Analisis transaksi	Peserta masih kesulitan menentukan pengaruh transaksi terhadap akun	Peserta mulai mampu menganalisis transaksi sederhana	Transaksi kompleks perlu dibahas melalui pendampingan lanjutan
4	Penyusunan jurnal umum	Transaksi dari BKU belum selalu dikonversi menjadi jurnal umum	Peserta memahami tahapan menyusun jurnal umum dari BKU	Diperlukan format contoh jurnal yang seragam
5	Penggunaan aplikasi PPAK BUMDes	Aplikasi belum digunakan secara optimal oleh sebagian peserta	Peserta mengenal alur input transaksi dan simulasi pencatatan berbasis aplikasi	Perlu monitoring penggunaan aplikasi setelah kegiatan
6	Pengarsipan bukti transaksi	Bukti belanja dan dokumen transaksi belum seluruhnya tertata sistematis	Peserta memahami pentingnya pengarsipan bukti transaksi berdasarkan jenis dan tanggal	Perlu SOP pengarsipan yang sederhana dan mudah diterapkan
7	Akuntabilitas pelaporan	Pelaporan belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari tata kelola usaha	Peserta memahami bahwa laporan keuangan mendukung akuntabilitas dan transparansi BUMNagori	Perlu evaluasi berkala oleh DPMN dan pengelola BUMNagori

Tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan perubahan positif pada aspek pengetahuan,

keterampilan, dan kesadaran peserta. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta terhadap

hubungan antara transaksi, akun, jurnal umum, aplikasi, dan laporan keuangan. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas ini masih perlu diperkuat melalui pendampingan lanjutan agar peserta mampu menerapkannya secara konsisten di BUMNagori masing-masing. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa perbaikan tata kelola tidak cukup dilakukan melalui pelatihan sesaat, tetapi membutuhkan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan (Mahmudi, 2016; Mardiasmo, 2021).

Dampak Kegiatan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BUMNagori

Kegiatan pendampingan ini berdampak langsung terhadap peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMNagori. Akuntabilitas keuangan tidak hanya ditunjukkan melalui tersedianya laporan, tetapi juga melalui kesesuaian antara transaksi, bukti pendukung, pencatatan, dan laporan yang dapat ditelusuri. Dalam akuntansi sektor publik, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya, kepatuhan terhadap aturan, serta penyajian informasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2021; Nordiawan & Hertianti, 2018) :

1. Peserta memahami bahwa setiap transaksi harus dicatat berdasarkan bukti yang sah. Bukti transaksi menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan karena berfungsi sebagai alat verifikasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanpa bukti transaksi yang tertata, laporan keuangan akan sulit dipertanggungjawabkan.
2. Peserta mulai memahami bahwa Buku Kas Umum perlu diolah menjadi informasi akuntansi yang lebih sistematis. BKU tetap penting sebagai catatan kas, tetapi laporan keuangan membutuhkan proses lanjutan berupa pengelompokan akun, penyusunan jurnal umum, dan penyajian informasi keuangan. Dengan demikian, peserta tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga memahami makna

transaksi tersebut terhadap posisi keuangan BUMNagori.

3. Penggunaan aplikasi PPAK BUMDes membantu mendorong pelaporan yang lebih tertib dan terarah. Aplikasi memberikan alur kerja yang sistematis, mulai dari input transaksi, klasifikasi, pencatatan, hingga penyusunan laporan. Apabila digunakan secara konsisten, aplikasi dapat membantu mengurangi kesalahan pencatatan manual dan mempercepat proses pelaporan.
4. Kegiatan ini memperkuat pemahaman bahwa laporan keuangan memiliki fungsi strategis dalam musyawarah nagori, evaluasi kinerja BUMNagori, pembagian laba usaha, pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Dengan demikian, laporan keuangan bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen tata kelola usaha nagori.

Kendala Teknis dan Nonteknis Selama Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala teknis dan nonteknis yang memengaruhi proses pendampingan. Beberapa kendala teknis antara lain :

1. Perbedaan kemampuan peserta dalam menggunakan perangkat digital. Sebagian peserta telah terbiasa menggunakan komputer dan aplikasi, tetapi sebagian lainnya masih memerlukan arahan teknis secara bertahap.
2. Keterbatasan perangkat dan kesiapan data transaksi. Praktik penggunaan aplikasi akan lebih optimal apabila peserta membawa data transaksi BUMNagori masing-masing, seperti BKU, bukti transaksi, dan dokumen belanja. Namun, tidak seluruh peserta memiliki dokumen lengkap pada saat pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, sebagian praktik masih menggunakan contoh transaksi yang disiapkan oleh narasumber.
3. Kendala teknis ketiga berkaitan dengan pemahaman alur aplikasi. Peserta yang belum terbiasa dengan sistem pencatatan digital membutuhkan waktu lebih lama

Wico J Tarigan, Sri Martina, Djuli Sjafei Purba, Liharmen Saragih, Mahaitin H Sinaga, Tuahman Sipayung, Elfina O P Damanik, Raja Mangaratua Nainggolan, Dian G Purna, Christin Imelda Girsang, Christian Daniel Hermes, Johanes Wilfrid Pangihutan Purba, Immanuelta Sitepu, Nabila Nurfadila, Mael Vantri Gultom, Romika Ambarita, Santri A Sijabat

untuk memahami tahapan input data, pengelompokan akun, dan simulasi jurnal umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan aplikasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia. Menurut (Sujarweni & Jaya, 2019), pengelolaan keuangan desa membutuhkan kecermatan aparatur dalam memahami dokumen, prosedur, dan alur pencatatan agar laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kendala nonteknis yang dihadapi adalah variasi latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta. Tidak semua bendahara dan pengelola BUMNagori memiliki latar belakang akuntansi. Oleh karena itu, istilah seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban, debit, kredit, jurnal umum, dan klasifikasi akun perlu dijelaskan secara sederhana dan berulang. Sebagian peserta juga masih memandang laporan keuangan sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat pengendalian dan evaluasi usaha.

Untuk mengatasi kendala tersebut, narasumber menerapkan strategi pembelajaran bertahap. Materi disampaikan mulai dari konsep dasar, contoh transaksi sederhana, praktik penyusunan jurnal, hingga simulasi aplikasi. Diskusi dan tanya jawab juga digunakan untuk membantu peserta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini penting agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkan materi dengan praktik pengelolaan keuangan BUMNagori.

Keterkaitan Kegiatan dengan Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Tata Kelola Keuangan Desa

Kegiatan pendampingan ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tata kelola keuangan desa. Prinsip transparansi tercermin dari upaya mendorong bendahara dan pengelola BUMNagori untuk mencatat setiap transaksi secara jelas, menyimpan bukti transaksi, dan menyusun

laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pihak berkepentingan. Transparansi tidak hanya berarti informasi tersedia, tetapi juga informasi tersebut tersusun secara tertib dan mudah ditelusuri (Mahmudi, 2026; Mardiasmo, 2021).

Prinsip akuntabilitas tercermin dari peningkatan kemampuan peserta dalam mempertanggungjawabkan transaksi keuangan BUMNagori. Melalui penyusunan jurnal umum dan penggunaan aplikasi PPAK BUMDes, setiap transaksi dapat dikaitkan dengan akun, bukti pendukung, dan laporan yang dihasilkan. Hal ini memperkuat posisi laporan keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Prinsip efektivitas terlihat dari penggunaan aplikasi sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan. Aplikasi PPAK BUMDes dapat membantu mempercepat proses pencatatan, mengurangi kesalahan manual, dan memudahkan pengelompokan transaksi. Efektivitas ini akan semakin kuat apabila peserta menerapkan pencatatan secara rutin dan tidak menunda penyusunan laporan hingga akhir periode.

Prinsip tata kelola keuangan desa terlihat dari keterpaduan antara sumber daya manusia, sistem pencatatan, dokumen pendukung, aplikasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Kegiatan ini memperkuat pemahaman bahwa pengelolaan BUMNagori harus dilakukan secara tertib, profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis peserta, tetapi juga memperkuat budaya tata kelola keuangan yang baik di tingkat nagori.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil kegiatan, terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun serta pengelola BUMNagori.

1. DPMN Kabupaten Simalungun perlu menyelenggarakan pendampingan lanjutan dalam bentuk klinik laporan

- keuangan BUMNagori. Klinik ini dapat menjadi ruang konsultasi bagi bendahara yang mengalami kendala saat menyusun jurnal umum, menginput transaksi, atau menggunakan aplikasi PPAK BUMDes.
2. DPMN perlu menyusun panduan teknis sederhana yang memuat contoh transaksi, klasifikasi akun, format jurnal umum, alur input aplikasi PPAK BUMDes, serta tata cara pengarsipan bukti transaksi. Panduan ini penting agar seluruh BUMNagori memiliki rujukan yang sama dalam menyusun laporan keuangan.
 3. Pengelola BUMNagori perlu membiasakan pencatatan transaksi secara rutin. Pencatatan tidak sebaiknya dilakukan hanya pada akhir periode laporan karena dapat meningkatkan risiko kesalahan, kehilangan dokumen, dan kesulitan dalam menelusuri transaksi.
 4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan aplikasi PPAK BUMDes. Monitoring dapat dilakukan melalui pemeriksaan laporan periodik, telaah kelengkapan dokumen, dan evaluasi terhadap konsistensi pencatatan transaksi.
 5. DPMN dapat membentuk forum komunikasi bendahara BUMNagori. Forum ini dapat digunakan untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan kendala teknis, menyamakan pemahaman, dan memperkuat jejaring pembelajaran antar-BUMNagori.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMNagori melalui aplikasi PPAK BUMDes di Kantor Camat Tanah Jawa memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kapasitas bendahara dan pengelola BUMNagori. Kegiatan ini membantu peserta memahami dasar akuntansi, menganalisis transaksi, menyusun jurnal umum dari Buku Kas Umum, menggunakan aplikasi PPAK BUMDes, serta menata bukti transaksi secara lebih sistematis.

Pendampingan tatap muka terbukti relevan karena peserta dapat langsung berdiskusi, mempraktikkan contoh transaksi,

dan memperoleh penjelasan atas kendala teknis yang dihadapi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hubungan antara bukti transaksi, BKU, jurnal umum, aplikasi, dan laporan keuangan. Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran peserta bahwa laporan keuangan BUMNagori bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tata kelola keuangan desa.

Meskipun kegiatan telah memberikan manfaat, pendampingan lanjutan tetap diperlukan agar kemampuan peserta dapat diterapkan secara konsisten di BUMNagori masing-masing. DPMN Kabupaten Simalungun perlu melakukan monitoring berkala, menyusun panduan teknis sederhana, serta memfasilitasi forum komunikasi bendahara BUMNagori. Dengan langkah tersebut, penggunaan aplikasi PPAK BUMDes diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan BUMNagori secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMNagori melalui aplikasi PPAK BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., & Kusufi, M. S. 2018. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

- Wico J Tarigan, Sri Martina, Djuli Sjafei Purba, Liharmen Saragih, Mahaitin H Sinaga, Tuahman Sipayung, Elfina O P Damanik, Raja Mangaratua Nainggolan, Dian G Purna, Christin Imelda Girsang, Christian Daniel Hermes, Johanes Wilfrid Pangihutan Purba, Immanuelta Sitepu, Nabila Nurfadila, Mael Vantri Gultom, Romika Ambarita, Santri A Sijabat
- Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 mengatur pendaftaran, pendataan, pemingkatan, pembinaan, pengembangan, dan pengadaan barang/jasa BUM Desa/BUM Desa bersama.
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi
- Nordiyawan, D., & Hertianti, A. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. PP Nomor 11 Tahun 2021 mengatur pendirian, organisasi, modal, aset, pengadaan barang/jasa, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Soleh, C., & Rohmansjah, H. (2015). Pengelolaan keuangan desa. Fokusmedia
- Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Faktor yang menentukan (determinan) akuntabilitas keuangan dana desa pasca penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Akuntansi ISSN, 9(3), 2019.
- Saragih, L., Purba, D. S., Sipayung, T., Tarigan, W. J., Girsang, R. M., Damanik, E. O., ... & Martina, S. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMNAG Maju Bersama. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(2), 76-88
- Purba, D. S., Damanik, E. O., Tarigan, W. J., Martina, S., Sipayung, T., Girsang, R. M., ... & Sinaga, M. H. (2024). Pembinaan Dan Pendampingan Koperasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Nasari Raja Dapotan Kabupaten Samosir. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(1), 7-16
- Purba, D. S., Saragih, L., Tarigan, W. J., Damanik, E. O. P., Martina, S., Sipayung, T., Sinaga, M. H., Saragih, N. indah, Turnip, E., & Sijabat, S. A. (2025). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Biro Usaha GKPS. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 5(2), 500-507